UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Satu Akar, Dua Bahasa: Pembedaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu Sebagai Strategi Pembentukan
Identitas Bangsa**
Christoph Joshua Bartho, Dr. Diah Kusumaningrum
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRAK

Bahasa merupakan komponen penting dalam pembentukan identitas nasional pada era nasionalisme. Kasus bahasa Indonesia dan bahasa Melayu menarik untuk diteliti karena, meskipun secara struktur linguistik keduanya merupakan bahasa yang sama, Indonesia dan Malaysia memilih menegaskan keduanya sebagai dua bahasa yang berbeda. Penelitian ini bertujuan menjawab mengapa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dikonstruksikan sebagai dua bahasa berbeda, serta bagaimana pemisahan tersebut memengaruhi pembentukan identitas nasional di kedua negara. Dengan menggunakan kerangka konseptual imagined community (Benedict Anderson), politik multikulturalisme (Robert W. Hefner), dan pemikiran Jan Blommaert mengenai bahasa sebagai alat pembentukan bangsa, penelitian ini berargumen bahwa pemisahan tersebut bukan semata proses linguistik, melainkan hasil dari tujuan tata bangsa yang berbeda antara Indonesia dan Malaysia. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi komparatif, penelitian ini menganalisis sejarah pembentukan kebijakan bahasa serta implementasinya di kedua negara, termasuk melalui penyusunan kamus resmi, penggunaan bahasa dalam media massa, dan sistem pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengonstruksi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu kelompok etnik yang beragam secara netral, sementara Malaysia mengonstruksi bahasa Melayu untuk menegaskan dominasi etnis Melayu atas etnis Cina, India, Dayak, dan Orang Asli. Perbedaan tujuan ini tercermin dalam pola kosakata serapan, ruang yang diberikan bagi bahasa daerah/etnis, serta dampaknya terhadap pergeseran bahasa dan persepsi identitas di kalangan kelompok minoritas di kedua negara. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan bahasa merupakan proses politik yang arbitrer dan konstruktif secara sosial, bukan hasil perkembangan linguistik organik semata.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Satu Akar, Dua Bahasa: Pembedaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu Sebagai Strategi Pembentukan
Identitas Bangsa**
Christoph Joshua Bartho, Dr. Diah Kusumaningrum
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

Language is an essential component in the formation of national identity in the era of nationalism. The case of Indonesian and Malay is particularly interesting to examine because, although the two are structurally the same language from a linguistic standpoint, Indonesia and Malaysia have chosen to assert them as two distinct languages. This study aims to answer why Indonesian and Malay have been constructed as two separate languages, and how this separation has influenced the formation of national identity in both countries. Drawing on the conceptual frameworks of imagined community (Benedict Anderson), the politics of multiculturalism (Robert W. Hefner), and Jan Blommaert's thinking on language as a tool of nation-building, this study argues that the separation is not merely a linguistic process, but the result of differing nation-building objectives between Indonesia and Malaysia. Using a qualitative method with a comparative study approach, this research analyzes the historical formation of language policy and its implementation in both countries, including through the compilation of official dictionaries, language use in mass media, and the education system. The findings show that Indonesia constructed the Indonesian language as a neutral unifying tool for its diverse ethnic groups, while Malaysia constructed the Malay language to assert the dominance of the ethnic Malays over the Chinese, Indian, Dayak, and Orang Asli (indigenous) ethnic groups. This difference in objectives is reflected in patterns of loanword adoption, the space granted to regional/ethnic languages, and their impact on language shift and perceptions of identity among minority groups in both countries. This study asserts that language policy is an arbitrary and socially constructive political process, rather than solely the result of organic linguistic development.